

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan yang terjadi antar daerah merupakan sebuah masalah yang masih menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi yang sudah ada sejak dahulu dan hingga kini masih belum sepenuhnya teratasi (Manik et al., 2024). Padahal, seluruh negara di dunia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta kualitas hidup masyarakatnya melalui proses pembangunan ekonomi yang mencakup berbagai kebijakan dan langkah strategis guna meningkatkan taraf kehidupan penduduk secara lebih adil dan merata sebagai dasar kuat bagi pembangunan di masa depan (Jati & Purnomo, 2023).

Ketimpangan pendapatan sendiri diartikan sebagai perbedaan pendapatan yang diperoleh masyarakat di suatu daerah. Fenomena ketimpangan pendapatan ini dapat terjadi di semua negara, baik yang sedang berkembang maupun yang sudah maju. Perbedaannya terletak pada seberapa besar atau kecil ketimpangan yang terjadi dan seberapa sulit untuk menyelesaikannya (Febriyani et al., 2021). Permasalahan ketimpangan pendapatan berkaitan erat dengan isu keadilan, kesamaan untuk akses sumber daya, keterbukaan informasi serta akses dalam proses pembangunan. Ketimpangan pendapatan muncul akibat ketidakseimbangan dalam kepemilikan sumber daya serta faktor produksi terutama modal (*capital stock*) dimana individu atau kelompok yang menguasai lebih besar faktor produksi cenderung memperoleh penghasilan yang lebih tinggi (Syahri & Gustiara, 2020).

Ketimpangan pendapatan bisa diukur menggunakan berbagai indikator, salah satunya adalah indeks gini atau *gini ratio*. *Gini ratio* merupakan indikator numerik agregat yang umum digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Skala nilainya berkisar dari 0 yang menunjukkan pemerataan sempurna hingga 1 yang menggambarkan ketimpangan sempurna (Todaro & Smith, 2020). Indeks *gini ratio* digunakan sebagai perhitungan ketimpangan pendapatan dikarenakan indeks ini sangat populer dipakai oleh para ekonom dan perhitungan indeks ini mampu menggambarkan distribusi pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dengan kelompok penduduk lainnya (Farhan &

Sugianto, 2022). Selain itu, indeks gini valid sebagai alat ukur ketimpangan karena kemampuannya memenuhi empat prinsip utama yakni prinsip anonimitas yang tidak mempertimbangkan siapa yang dihitung apakah kaya atau miskin, prinsip independensi skala yang menunjukkan ketidakbergantungannya pada perekonomian suatu negara, prinsip independensi populasi yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah penduduk, serta prinsip transfer yang mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan (Bhagaskara, 2023).

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keinginan untuk mencapai status sebagai negara maju dalam aspek perekonomian dan kesejahteraan dengan harapan agar terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Namun, hingga saat ini masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia masih menjadi sebuah tantangan ekonomi dan selalu menjadi sebuah permasalahan karena mempunyai tingkat ketimpangan yang berbeda pada setiap wilayahnya (Al Aqilah et al., 2024).

Mengacu pada data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (2025), *gini ratio* Indonesia mengalami fluktuasi dan secara umum menunjukkan sedikit kenaikan. Angka *gini ratio* mencapai hingga 0,388 pada tahun 2023 yang terlihat lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,384. Pada tahun 2023, beberapa provinsi di Indonesia masih mencatat angka *gini ratio* yang lebih tinggi dibandingkan *gini ratio* nasional, diantaranya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,449, DKI Jakarta sebesar 0,431, Jawa Barat sebesar 0,425 dan Gorontalo sebesar 0,417. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik tersebut, diketahui bahwa tiga dari enam provinsi di Pulau Jawa termasuk salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Provinsi DIY menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena tingkat *gini ratio* di sana masih terbilang yang tertinggi, mengingat meskipun DIY memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan pendidikan tetapi malah menempati posisi sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan paling tinggi di Indonesia (Prabowo, 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2025)

Gambar 1.1 Perbandingan *Gini Ratio* DIY dan Indonesia Tahun 2014-2023

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa *gini ratio* di DIY pada tahun 2014-2023 berada di kisaran 0,42, 0,43 dan 0,44 yang berarti bahwa sekitar 40% an penduduk DIY mengalami ketimpangan pendapatan. *Gini ratio* DIY sejak tahun 2014 mengalami peningkatan dari 0,389 menjadi sebesar 0,449 pada tahun 2023. *Gini ratio* tahun 2023 ini merupakan *gini ratio* paling tinggi diantara tahun-tahun sebelumnya serta melebihi *gini ratio* nasional yang tercatat sebesar 0,388 pada tahun 2023. Ketimpangan pendapatan di beberapa kabupaten/kota DIY juga masih berada di atas angka nasional dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Kota Yogyakarta yang memiliki rata-rata rasio gini sebesar 0,437 sementara itu tingkat ketimpangan pendapatan terendah di Gunungkidul dengan rata-rata rasio gini sebesar 0,329. Perkembangan *gini ratio* di DIY selama periode 2014-2023 ini belum memberikan kabar yang positif walaupun tingkat *gini ratio* nya termasuk ke dalam kategori ketimpangan sedang dikarenakan angka *gini ratio* di DIY masih lebih tinggi dari *gini ratio* nasional yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di antara penduduknya masih belum merata sepenuhnya. Kondisi ketimpangan pendapatan ini harus menjadi perhatian pemerintah agar dapat segera ditangani dengan tepat dan diperlukan identifikasi yang akurat terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya (Al Aqilah et al., 2024).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena mencerminkan keberhasilan pembangunan di setiap daerah dalam suatu perekonomian. Ketika laju pertumbuhan ekonomi meningkat, kapasitas produksi juga mengalami kenaikan

yang berdampak pada peningkatan output. Peningkatan output tersebut berimplikasi pada bertambahnya pendapatan masyarakat yang selanjutnya dapat mendorong naiknya pendapatan perkapita serta berpotensi menekan tingkat ketimpangan pendapatan (Ramadhan & Sulistyono, 2021). Namun, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak selalu bersifat linear. Teori Kuznets mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat tetapi akan mengalami penurunan setelah melewati titik tertentu seiring dengan berlanjutnya proses pertumbuhan ekonomi (Farhan & Sugianto, 2022). Hal ini didukung oleh temuan Odusanya (2023) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi justru berkontribusi terhadap penurunan tingkat ketimpangan pendapatan.

Temuan Odusanya (2023) tersebut menunjukkan pentingnya menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam dua dimensi waktu jangka pendek dan jangka panjang untuk melihat implementasi dari teori Kuznets. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznets apakah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pada tahap awal meningkatkan ketimpangan pendapatan dan dalam jangka panjang berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan konstan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Violin & Lutfi, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2023 mencapai 5,07 persen sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,15 persen. Meskipun demikian, perekonomian DIY tetap menunjukkan kondisi yang stabil karena laju pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2023 tersebut tercatat sebagai yang tertinggi diantara provinsi lain di Pulau Jawa dan juga lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,05 persen di tahun 2023. Meski demikian, angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut belum mampu secara efektif mengurangi ketimpangan pendapatan di DIY.

Disisi lain, kemiskinan merupakan salah satu unsur yang juga berkontribusi terhadap melebarnya kesenjangan pendapatan karena tidak terpenuhinya kebutuhan

dasar. Dalam hal ini, ketimpangan pendapatan akan semakin melebar apabila jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan meningkat dan ketimpangan akan menyempit ketika jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan turun (Anfa & Bintariningtyas, 2022). Secara umum menurut data Badan Pusat Statistik (2024), persentase penduduk miskin di DIY pada periode 2014-2023 menunjukkan tren penurunan dari 14,55 persen di tahun 2014 menjadi 11,04 persen di tahun 2023. Namun demikian, angka kemiskinan mengalami beberapa fluktuasi. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan angka kemiskinan akibat naiknya harga kebutuhan pokok yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Setelah itu, angka kemiskinan kembali menurun selama periode 2016 hingga 2019. Namun di tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan kemiskinan kembali yang disebabkan wabah Covid-19. Selanjutnya, di tahun 2022 sampai 2023 angka kemiskinan mengalami penurunan berturut turut dari sebesar 11,34 persen di tahun 2022 menjadi 11,04 persen di tahun 2023. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan DIY tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan belum menekan angka ketimpangan pendapatan DIY.

Julihanza & Khoirudin (2023) menjelaskan bahwa upah minimum adalah salah satu faktor lain yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan dikarenakan upah minimum memainkan peran kunci dalam membentuk struktur ketimpangan ekonomi antar kelompok pendapatan. Peningkatan upah minimum di setiap provinsi dipandang sebagai kebijakan yang strategis untuk memperkecil ketimpangan pendapatan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Fanshuri & Saputra (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan upah minimum berpotensi menurunkan ketimpangan karena kenaikan upah mendorong peningkatan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini secara tidak langsung mendorong permintaan terhadap barang dan jasa yang mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya akan berdampak pada penurunan ketimpangan. Oleh karena itu, penetapan upah minimum mampu mendorong terciptanya standar upah yang lebih tinggi sehingga dapat mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil (Sulistyaningrum et al., 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), pada tahun 2023 pemerintah

DIY menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp. 1.981.782 per bulan, mengalami kenaikan sebesar 7,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, upah minimum di DIY menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Meskipun terjadi kenaikan upah minimum, hal ini belum berdampak dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari laju pertumbuhan PDRB di DIY serta diiringi dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan upah minimum setiap tahunnya, seharusnya kondisi ini dapat membantu menekan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Namun pada kenyataannya, di DIY faktor-faktor tersebut belum mampu untuk menjamin rendahnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara efektif karena ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah yang terus terjadi di DIY. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan distribusi pendapatan yang diupayakan pemerintah masih belum terpenuhi.

Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di DIY serta kajian dari berbagai penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan analisis dilakukan dengan menerapkan metode data panel dinamis dengan cakupan 5 kabupaten/kota di DIY dalam periode 2014-2023 yang dituangkan dalam sebuah penelitian berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian dalam latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini akan mengkaji permasalahan berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

3. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah paparkan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan sejumlah manfaat yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Penulis

Melalui proses penelitian ini, penulis dapat mengasah kemampuan dan keterampilan dalam analisis, metodologi penelitian dan penulisan ilmiah yang dapat berguna untuk pengembangan akademis dan profesional di masa depan.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini bisa memberikan wawasan baru dan memicu diskusi dan debat akademis mengenai kebijakan ketimpangan pendapatan dan mendorong kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan praktisi untuk merumuskan solusi yang lebih baik dan efektif terhadap masalah ketimpangan pendapatan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti mendatang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan upah minimum

kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam analisis ini, ketimpangan pendapatan berfungsi sebagai variabel dependen, sementara itu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, serta upah minimum kabupaten/kota adalah variabel independen. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk rentang waktu 2014 hingga 2023. Metode analisis yang digunakan menerapkan metode panel dinamis GMM mencakup 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2014-2023.

